



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUGENG WINARNO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 441674

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/119 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/170 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **63.500.000**

1. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA VIJ02Q320LA/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
3. MOTOR, HONDA X1H0 2N35M1AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.710.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 502.214.710

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.564.424.710

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.564.424.710

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.